



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Jl. Pasir Putih Komplek TPI Teluk Dalam – Nias Selatan (22865)

Email : dkp.kabnisel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan, Laporan Kinerja ini merupakan media bagi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Nias Selatan atas mandat yang diberikan.

Laporan Kinerja merupakan sumber informasi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, serta menentukan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini berisikan informasi Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2024. Rencana kinerja tahun 2024 pada dasarnya merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam reviu Rencana Strategis Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, sedangkan capaian kinerja adalah hasil realisasi dari rencana kinerja tersebut.

Teluk Dalam, 27 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Nias Selatan,



TEHEJATULO SARUMAHA, S.Pt
PEMBINA Tk. I
NIP 19801212 201101 1 002

DAFTAR ISI

	HAL.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Sumberdaya Manusia	9
1.6 Sarana dan Prasarana	11
1.7 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Visi dan Misi	15
2.3 Tujuan dan Sasaran	16
2.4 Strategi kebijakan dan Program	19
2.5 Indikator Kinerja	23
2.6 Perjanjian Kinerja 2023	23
2.7 Perencanaan Anggaran	25
2.8 Rencana Kinerja Tahunan	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	29
3.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir	31
3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Daerah	33
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan	34
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	39
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan/ Indikator Kinerja	41
B Realisasi Anggaran	44

BAB IV	PENUTUP	45
	4.1 Kesimpulan	45
	4.2 Saran	45

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		HAL.
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.	9
Tabel 1.2	Kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	9
Tabel 1.3	Kondisi pegawai berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.4	Jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan.	10
Tabel 1.5	Kondisi Sarana dan Prasarana	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan	18
Tabel 2.2	Strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan pada Dinas Perikanan Kab. Nias Selatan	19
Tabel 2.3	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan	20
Tabel 2.4	Indikator Kinerja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	23
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan	24
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan	24
Tabel 2.7	Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan	25
Tabel 2.8	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2023	29
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2023	30
Tabel 3.4	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2023	31
Tabel 3.5	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP	32
Tabel 3.6	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2023	33
Tabel 3.7	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2023	33
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	40
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	40
Tabel 3.10	Program/Kegiatan Penunjang Capaian Sasaran Strategis	42
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Dinas Perikanan TA. 2022	44

DAFTAR GAMBAR

	HAL.
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi	9
Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	29
Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	30
Gambar 4. Grafik Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir untuk Sasaran Strategis 1	31
Gambar 5. Grafik Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir untuk Sasaran Strategis 2	32
Gambar 6. Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	34
Gambar 7. Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) diperlukan pengawasan yang efektif dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan nyata. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bersih serta bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya turut memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi '*Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera*', serta berperan secara aktif dalam misi (1) *Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan*; (2) *Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif*.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, ditetapkan 1 (satu) Program wajib dan 3 (empat) program pilihan periode tahun 2021 - 2026 pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan berdasarkan

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; (3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan (4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja, yakni (1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; dan (2) Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Pada sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Nilai LAKIP Evaluasi Internal dengan capaian yang masih belum diperoleh sehubungan dengan masih dalam tahapan penyerahan dan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Sementara untuk Sasaran Strategis 2 terdiri dari 3 (Tiga) indikator yakni (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dengan realisasi tingkat capaian masih belum diperoleh sehubungan dengan masih dalam tahapan publikasi oleh BPS Kabupaten Nias Selatan; (2) Nilai Produksi Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian 131%; dan (3) Nilai Produksi Perikanan Budidaya dengan tingkat capaian 68 %.

Untuk realisasi anggaran, pagu Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 sebesar Rp. 1.255.080.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.247.257.092,00 sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar 97%.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan roda pemerintahan pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta melakukan penegakan supremasi hukum. Kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan nilai-nilai ideal akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta mampu berkontribusi untuk pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengawasan yang efektif dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan nyata. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bersih serta bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (berkala).

Dengan realitas tersebut, maka seluruh kegiatan yang telah terprogramkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan harus dapat dipertanggungjawabkan atas capaian hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Nias Selatan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaankinerja akan

menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan, sehingga dalam penyusunan laporan ini mengacu kepada :

- 1) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
- 5) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- 6) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- 7) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 8) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
- 9) Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya.

Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Government* yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perikanan Nias Selatan.
2. Mendorong Dinas Perikanan Nias Selatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Dasar hukum pendirian Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perikanan merupakan perangkat daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota..

1.3.2 Tugas dan Fungsi

Rincian tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
 - b) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - c) Pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan;

- d) Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
 - e) Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - f) Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - g) Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - h) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama dengan Menteri Teknis.
- 2) Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan kerumahtanggaan, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:
- a) Pengkoordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas;
 - b) Pengkoordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas;
 - c) Pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas;
 - d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
 - e) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f) Penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang –undangan;
 - g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - h) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud dibantu oleh 2 (dua) sub bagian, sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - c) Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e) Melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
 - f) Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
 - g) Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
 - h) Melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
 - i) Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - j) Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - k) Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
 - l) Menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standard operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang perikanan;
 - m) Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - n) Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
 - p) Menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
 - q) Menyusun konsep pembuatan profil dinas;
 - r) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan;
 - c) Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi publik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup dinas;
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - f) Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g) Mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai kewenangannya;
 - h) Mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan ASN sesuai kewenangannya;
 - i) Mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
 - j) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup dinas;
 - k) Merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/perengkapan dinas;
 - l) Melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan;
 - m) Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
 - n) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
 - o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.;
2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- 4) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan dan Pengelolaan Perikanan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1. Seksi Penerbitan SIUP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan.
 2. Seksi Penerbitan TPUPI dan TPKPIH, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUPI dan TPKPIH;
 3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.
- 5) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

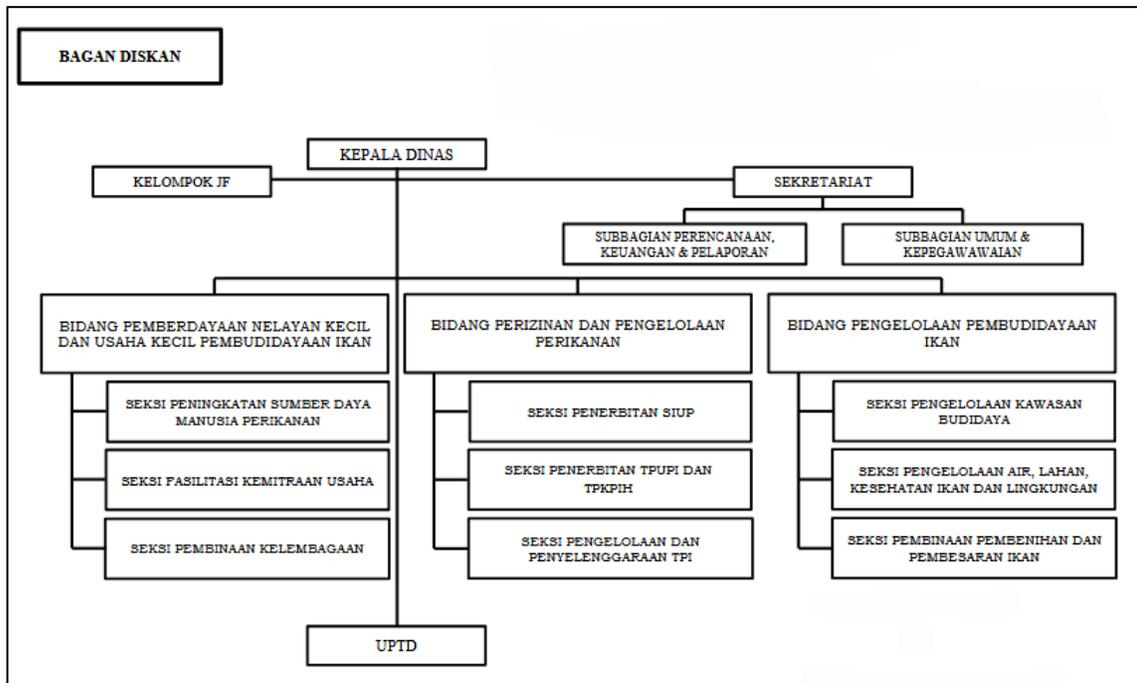
1. Seksi Pengelolaan Kawasan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
2. Seksi Pengelolaan Air, Lahan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan.
3. Seksi Pembinaan Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Diklat Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Fasilitasi Kemitraaan Usaha; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
4. Bidang Perizinan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Penerbitan TPUPi dan TPKPIH; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.
5. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Kawasan;

- b. Seksi Pengelolaan Air, Lahan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pembenihan dan Pembesaran Ikan.
6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

1.5 Sumberdaya Manusia

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia serta aset/modal yang dimiliki. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	2021	11	4	16
2	2022	10	6	16
3	2023	10	5	14
4	2024	9	7	16

Pada Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan lebih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan jenjang pendidikan, kondisi pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	3	
2	S1	11	
3	Diploma	0	
4	SMA	2	

Berdasarkan pada **Tabel 1.2** di atas dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan sudah baik di mana sebagian besar telah berpendidikan Strata-1.

Untuk kondisi pegawai di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Kondisi pegawai berdasarkan Golongan.

No.	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	0	0	0
2	II	0	1	1
3	III	9	4	13
4	IV	2	0	2

Berdasarkan data pada **Tabel 1.3** di atas, dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagian besar pegawai dengan golongan III.

Sementara apabila ditinjau dari hirarki jabatan, keadaan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 1.4 Jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan.

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	II.b	1	
2.	Sekretaris	III.a	1	
3.	Kepala Bidang	III.b	3	
4.	Kasubbag/ Kepala Seksi	IV.a	6	
5.	Staf	-	4	

Dengan rincian kondisi susunan kepegawaian tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dapatlah dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban terutama dimana masih terdapat jabatan yang belum terisi dan jumlah staf teknis yang belum mencukupi.

1.6 Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pencapaian target program dan kegiatan tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Untuk saat ini Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas dalam melaksanakan kegiatannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi Rill (Buah/Unit)	Kondisi ideal (Buah/unit)
1	Bangunan gedung Kantor	2	3
3	Kendaraan roda 4	1	2
4	Kendaraan roda 2	4	6
5	Kursi kerja staf	20	25
6	Meja staf	12	25
7	Meja eselon II	1	1
8	Meja eselon III	1	4
9	Meja Eselon IV	5	11
10	AC	4	8
11	Komputer PC	7	10
12	Laptop	2	8
13	Filing kabinet	3	5
14	Lemari arsip	7	20
15	Printer	5	10
16	OHP	1	2
17	Kamera	3	5
18	Gedung Aula	0	1
19	Alat Ukur Kualitas Air	0	10

1.7 Isu Strategis

Pembangunan perekonomian kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2026.

Pembangunan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat

prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengkajian data, evaluasi dan analisa serta observasi lapangan dari pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang menjadi isu strategis dan membutuhkan pemecahan masalah kedepannya yakni sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil :
 - a. tidak adanya kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pasca terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat melakukan intervensi secara langsung baik dalam bentuk penindakan atas pelanggaran pengelolaan SDKP;
 - b. Minimnya koordinasi lintas stakeholder terkait kerjasama atau dukungan pengawasan SDKP;
 - c. Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Masih adanya aktifitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (PITRAL) terutama *Destruktive fishing* di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap :
 - a. Sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan masih terbatas dan tradisional. Jumlah Kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
 - b. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penangkapan ikan masih terbatas;
 - c. Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan keterbatasan suplai kebutuhan BBM yang disebabkan oleh tidak adanya SPBN terutama di wilayah kepulauan;
 - d. Tidak adanya kantor layanan perizinan dan pendaftaran kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga nelayan dengan kapal penangkap ikan pada ukuran tersebut kesulitan dalam melakukan pengurusan perizinan dan pendaftaran kapal.
3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan :
 - a. Meningkatnya harga pakan ikan sehingga meningkatkan biaya produksi;
 - b. Belum adanya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - c. Sarana dan prasarana standard pembudidayaan ikan masih terbatas dengan pembudidayaan ikan yang masih tradisional;
 - d. Sumber induk dan bibit unggul komoditas ikan budidaya masih terbatas;

- e. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pembudidayaan ikan masih terbatas.
 - f. Kesulitan layanan Standarisasi manajemen pengelolaan mutu (MPM) oleh pelaku usaha pembudidayaan ikan.
4. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan :
- a. Sarana dan prasarana pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang masih terbatas;
 - b. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah;
 - c. Layanan pengujian kelayakan produk tidak ada di Kabupaten Nias Selatan;
 - d. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan Kabupaten Nias Selatan;
 - e. Belum adanya UPI dan supplier yang memiliki sertifikat kelayakan pengolahan SKP;
 - f. Sebagian besar wilayah pulau-pulau kecil belum memiliki akses listrik sehingga kesulitan dalam melakukan pengawetan produk perikanan dalam bentuk pembekuan/pendinginan.
5. Hukum dan Kelembagaan :
- a. Lemahnya penataan dan penegakkan hukum.
 - b. Tidak tersedianya sistem informasi dan manajemen *database* pengelolaan perikanan dan kelautan.
 - c. Lemahnya peranan kelembagaan ekonomi dalam memberdayakan SDM Kelautan dan perikanan.
6. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya.
- a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan baik dalam pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi.
 - b. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir.
 - c. Rendahnya kualitas dan daya saing produk-produk perikanan.
 - d. Rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk-produk perikanan.
7. Degradasi Habitat dan Ekosistem Wilayah Pesisir
- a) Ancaman abrasi dan sedimentasi.
 - b) Mitigasi bencana.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 berupaya untuk menyelesaikan isu lokal dan nasional maupun global seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, menekan angka pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

2.2 Visi dan Misi

A. Visi

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan sejahtera. Visi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi berbagai kalangan dan komponen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nias Selatan.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dan melanjutkan pembangunan yang belum selesai periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun

2016-2021 maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap – IV Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

‘NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA’

Penjabaran dari Visi tersebut :

- ✚ **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- ✚ **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang ditentukan untuk mencapai Visi. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Visi dengan mengambil Langkah – Langkah yang tidak hanya efektif tapi juga efisien. Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi dengan penajamannya yakni sebagai berikut:

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan:

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas :

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan disesuaikan dengan prioritas utama masing-masing wilayah untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif :

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi serta Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Dengan

berkembangnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan memiliki Pendidikan yang tinggi, akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya Berdaya saing tapi juga Sumber daya manusia yang kompetitif dan Inovatif.

4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif :

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan.

5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat :

Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. Dengan terpenuhinya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Berdasarkan kelima misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Nias selatan juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 yaitu **”Nias selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”** serta berperan secara aktif dalam misi berikut ini :

- 1) **Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan;**
- 2) **Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.**

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah gambaran dari suatu kondisi yang dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan dalam waktu lima tahun mendatang. Tujuan Pembangunan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD yang memberi gambaran hasil akhir dari jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi - Misi dalam RPJMD. Dimana perumusan tujuan kabupaten Nias Selatan dimuat ke dalam lima hal dan ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu – isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah. Hasil pembangunan Daerah tersebut diperoleh dari outcome program perangkat daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan pembangunan. Sama halnya tujuan pembangunan, sasaran juga disusun mengacu pada permasalahan pembangunan dan isu – isu strategis Kabupaten Nias Selatan.

Penyusunan sasaran, merupakan rumusan yang lebih detail dan terukur. Artinya, Sasaran pembangunan ditetapkan sesuai dengan indikator dan target kinerja secara spesifik, terfokus dan terukur. Dimana, perumusannya dapat dicapai dengan indikator-indikator pembangunan atau indikator kinerja. Indikator Kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan baik urusan peningkatan SDM aparatur dan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan maupun urusan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan yang lain. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan misi dapat diuraikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien.	Nilai LAKIP	Predikat	C	C	C	B	B	A	A
2.	Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan		Persentase	0,61	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	5,33
		Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/ Milyar	250	260	265	270	275	280	285
		Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/ Milyar	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	4,5	

2.4 Strategi kebijakan dan Program

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi merupakan langkah - langkah yang berisi program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta pencapaian dari tujuan dan sasaran RPJMD .Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Rencana Kerja yang actionable.Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap sebagai sesuatu yang strategis.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan khususnya di Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terdapat pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2 Strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan pada Dinas Perikanan Kab. Nias Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan			
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pmerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien.	Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan partisipatif.
		Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan	Peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang selektif dan relevan dengan program dan kegiatan Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan
Misi 4: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif			
Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Mendorong Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan menjadi sektor unggulan Perekonomian daerah	Meningkatkan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, ditetapkan 1 (satu) Program wajib dan 3 (empat) program pilihan periode tahun 2021 - 2026 pada Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan**

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; • Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD; • Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; • Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; • Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD; • Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD; • Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; • Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; • Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai; • Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; • Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; • Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian; • Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; • Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; • Penyediaan Bahan Logistik Kantor; • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; • Penyediaan Bahan/Material; • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; • Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; • Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; • Pengadaan Mebel; • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; • Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat; • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; • Pemeliharaan Mebel; • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; • Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
II PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; • Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; • Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; • Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil; • Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); • Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT; • Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
5	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT;

	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
6	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT; • Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
III PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing; • Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; • Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil; • Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; • Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat; • Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat; • Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
IV PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan

	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.5 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan merupakan hal yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian RPJMD. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	NILAI LAKIP	C	C	C	B	B	A	A
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.61	0,61-179	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	5,33
4.	Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/ Milyar	255	260	265	270	275	280
5.	Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/ Milyar	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja dan perubahannya pada Tahun 2024.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien.	Nilai LAKIP	A
	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	2,97-4,15
		Nilai Produksi perikanan tangkap	265 Milyar Rupiah
		Nilai Produksi perikanan budidaya	3,50 Milyar Rupiah

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien.	Nilai LAKIP	A
	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	2,97-4,15
		Nilai Produksi perikanan tangkap	265 Milyar Rupiah
		Nilai Produksi perikanan budidaya	3,50 Milyar Rupiah

2.7 Perencanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indicator perjanjian kinerja, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan mewujudkannya dalam 4 (empat) program kegiatan dengan indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dengan dukungan belanja anggaran langsung (APBD) sebesar **Rp. 955.080.000,00,-** dan anggaran belanja langsung perubahan (P-APBD) sebesar **Rp1.255.080.000,00,-** sebagaimana diuraikan pada table berikut ini.

Tabel 2.7 Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

Uraian	Indikator	Target	Anggaran APBD (Rp.)	Anggaran Perubahan P-APBD (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	505.074.538	716.142.924,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	8.750 Ton/ Tahun	345.125.118	345.125.118,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya	45 Ton/ Tahun	150.019.344	149.112.958,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi makan ikan	2.700 ton/Tahun	0	44.699.000,00

2.8 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 adalah Pelaksanaan Renstra Tahun ketiga sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang meliputi penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, untuk Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada **Tabel 2.8** berikut ini.

Tabel 2.8 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2024

No.	Indikator Program	Capaian Kinerja Program			Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
		Target	Realisasi	%				
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan; Nilai Lakip OPD	100%	100%	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan RKA SKPD	1 Dokumen
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan keuangan	12 Dokumen
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket Kegiatan Administrasi umum	5 paket
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	12 Laporan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD yang dipelihara	1 Unit
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan								
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	8750 Ton	8870,45 ton	101,38	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Perahu/Kapal Penangkap Ikan Uk. 1 GT	1 Unit
							Perahu Penangkapan Ikan Ik. 0,5 GT	4 Unit
							Kapal Penangkap Ikan Ukuran 5 GT beserta Mesin	1 Unit
							Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan : Fish Finder + GPS Komplit	1 Unit
							Pengadaan Cold Box untuk nelayan	2 Buah
							Mesin BBG untuk nelayan	50 Unit

No.		Indikator Program	Capaian Kinerja Program			Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
			Target	Realisasi	%			
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya	45 Ton	38 ton	84,44	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penyuluhan Pembudidayaan Ikan	15 Kelompok
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembangunan Kolam Budidaya Ikan Air Tawar	1 Unit/Paket
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produk hasil olahan kelautan dan perikanan	2500 ton	2330 ton	93,2	Pendataan Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Dokumen Produksi	1 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengertian capaian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab tugas pokok yang menjadi kewenangannya. Capaian kinerja dapat dihitung melalui proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Bupati Nias Selatan.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 sebagaimana pada **Tabel 3.1** berikut ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Predikat	Interprestasi
1.	AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuaskan
2.	A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan
3.	BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik
4.	B (Nilai >60 – 70)	Cukup (memadai)
5.	CC (Nilai <50 – 60)	Sangan Rendan
6.	C (Nilai >30 – 50)	Kurang
7.	D (Nilai 0 – 30)	Sangat Kurang

Adapun pengukuran pencapaian kinerja dimaksud adalah membandingkan target dan realisasi dari seluruh sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023. Penyajian capaian kinerja ini akan disajikan berdasarkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

🚩 Sasaran Strategis 1

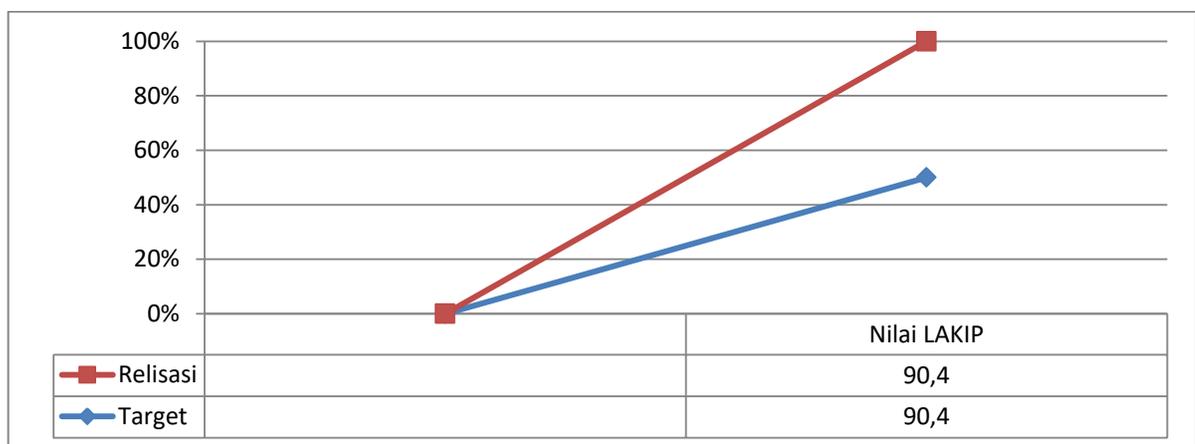
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Adapun Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada **Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan**, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Relisasi	Tingkat Capaian	Sumber Data
1	3	4	5	6	7	8	8
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	Nilai LAKIP	Nilai Predikat	91	-	-	LHE AKIP

Pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, target nilai LAKIP untuk tahun 2024 adalah Kategori 'AA' (Nilai >90 – 100). Sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023, memperoleh predikat kategori 'AA' dengan nilai perolehan 90,4%. Atas hal tersebut, maka pada tahun 2023 Dinas Perikanan menaikan target nilai LAKIP-nya menjadi Kategori 'AA' dengan target nilai 91,00.



Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Hasil penilaian LAKIP Tahun 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan masih belum diperoleh, sehubungan dengan masih dalam tahapan review dan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran Strategis 2

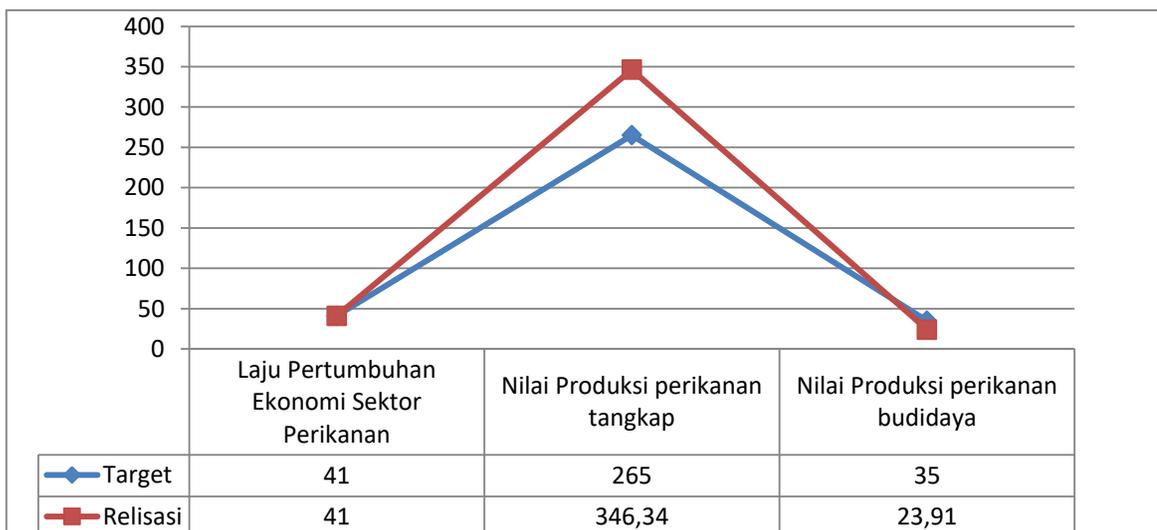
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan

Adapun Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 dengan tujuan Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada **Misi 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2024

Misi 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.							
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	2,97-4,15	-	-	BPS Kabupaten Nias Selatan
		Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/Milyar	265	346,34	131%	Validasi Nasional Satu Data KKP
		Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/Milyar	3,5	2,390	68%	Validasi Nasional Satu Data KKP

Capaian sasaran strategis untuk untuk laju pertumbuhan ekonomi sector perikanan masih belum diperoleh, sehubungan dengan belum adanya rilis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan. Nilai produksi perikanan tangkap masih belum memenuhi target secara optimal, sehubungan dengan kondisi cuaca yang menyebabkan nelayan dan pelaku usaha perikanan tidak bisa melakukan penangkapan ikan dan pengolahan pemasaran hasil perikanan, sehingga berdampak pada capaian produksi dan nilai produksi perikanan tangkap. Untuk perikanan budidaya, belum maksimalnya capaian pada target yang ditetapkan juga disebabkan oleh factor cuaca, dimana khusus untuk budidaya air laut, beberapa Keramba Jaring Apung yang merupakan media pembudidayaan ikan mengalami kerusakan dan kematian komoditas ikan budidaya. Untuk budidaya air tawar, turut terdampak cuaca buruk yang menyebabkan beberapa kawasan budidaya mengalami banjir dan longsor, serta kesulitan akses pakan dan kematian komoditas ikan yang dibudidayakan.



Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

3.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

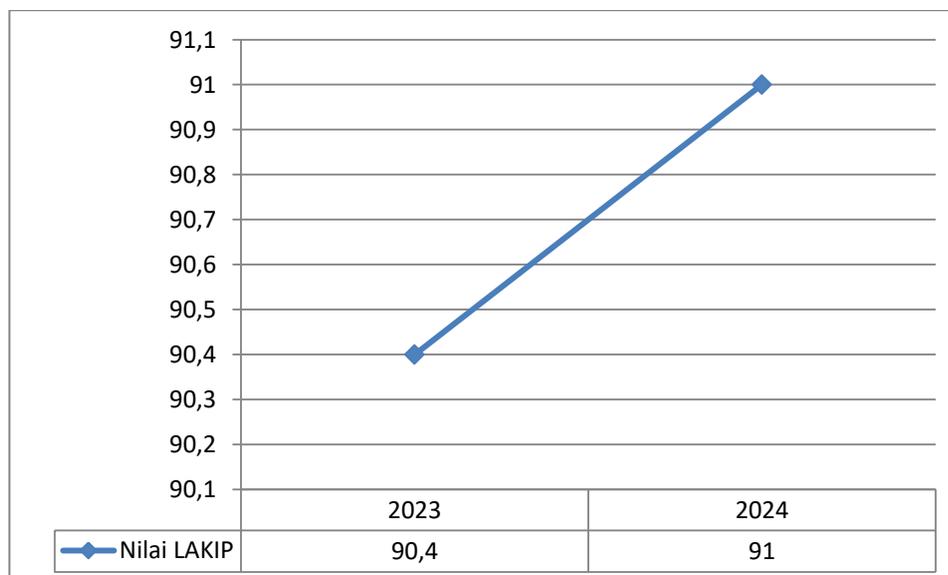
📌 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) Sasaran Strategis 1 dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada **Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan**, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Relisasi		Tingkat Capaian
					2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien.	Nilai LAKIP	Nilai Predikat	91	90,4	-	-



Gambar 4. Grafik Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir untuk Sasaran Strategis 1

Tingkat capaian masih belum diperoleh, sehubungan dengan masih dalam tahapan review dan penilaian serta evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Sehingga untuk kebutuhan grafik yang disajikan dengan menyamakan nilai capaian pada tahun sebelumnya. Setelah nilai evaluasi diperoleh, maka akan diperbaiki selanjutnya.

Sasaran Strategis 2

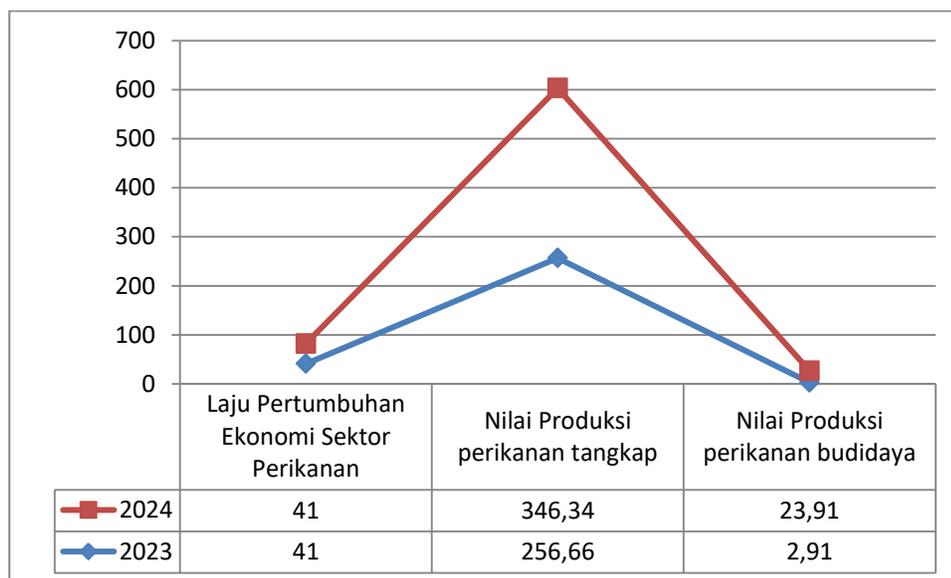
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan

Adapun Pengukuran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) Sasaran Strategis 2 dengan tujuan Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada **Misi 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Relisasi		Tingkat Capaian
					2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	2,97-4,15	-	-	-
		Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/ Milyar	265	256,66	346,34	135%
		Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/ Milyar	3,5	2,910	2,390	82,13%

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi belum dapat dihitung sehubungan dengan belum diperolehnya rilis dari BPS Kabupaten Nias Selatan. Untuk perbandingan nilai produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan tingkat capaian dimana pada tahun 2023 tingkat capaian 102% dan pada tahun 2023 mencapai 135%. Untuk nilai produksi budidaya dengan tingkat capaian 119,36 % pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yakni 82,136 %.



Gambar 5. Grafik Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir untuk Sasaran Strategis 2

3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Daerah

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

perbandingan antara realisasi kinerja *Strategis 1* tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada **Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan**, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.6 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra	Relisasi 2024	Tingkat Kemajuan	Sumber Data
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	Nilai LAKIP	Predikat	95	90,4	95,16%	LHE LAKIP TA. 2023

Data diatas berdasarkan LHE Tahun 2023. Tingkat kemajuan masih belum diperoleh, sehubungan dengan masih dalam tahapan review dan penilaian serta evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan

perbandingan antara realisasi kinerja *Strategis 2* tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dengan tujuan Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada **Misi 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2024

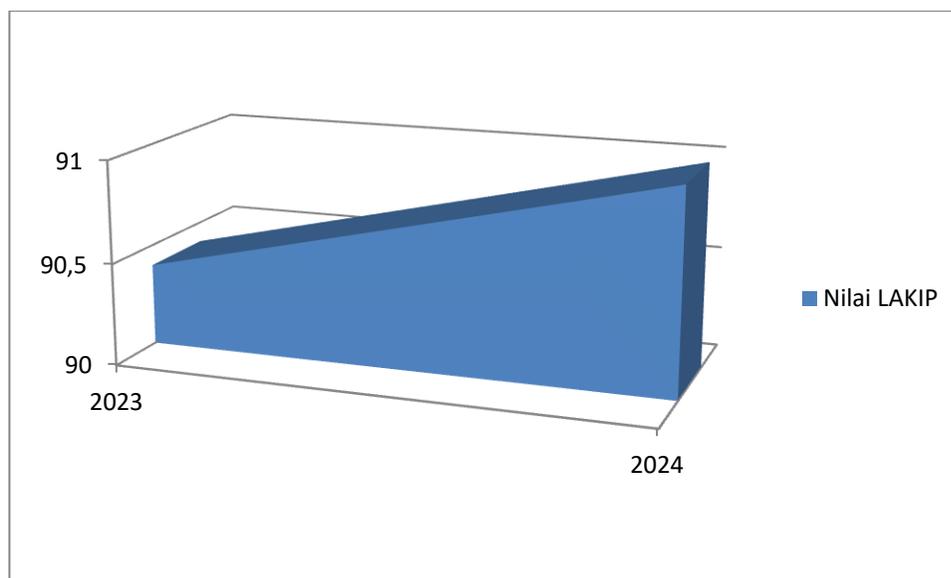
No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra	Relisasi 2024	Tingkat Kemajuan	Sumber Data
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	2,97-4,15	-	-	BPS
		Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/ Milyar	275	346,34	125,94%	Diskan
		Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/ Milyar	4,5	2,390	53,11%	Diskan

Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah, untuk laju pertumbuhan ekonomi sector perikanan masih belum dapat diukur capaiannya, sehubungan dengan belum adanya rilis data laju pertumbuhan ekonomi dari BPS Kabupaten Nias Selatan. Untuk nilai produksi perikanan tangkap tingkat kemajuan mencapai 125,94% dan nilai produksi budidaya mencapai 53,11%. Sehubungan dengan target jangka menengah daerah untuk tahun 2024 merupakan tahun ke-3, maka untuk kedepannya sangat perlu peningkatan realisasi capaian secara maksimal.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan

📌 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan



Gambar 6. Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis 1 sebelumnya dan grafik capaian di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud. Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai LAKIP

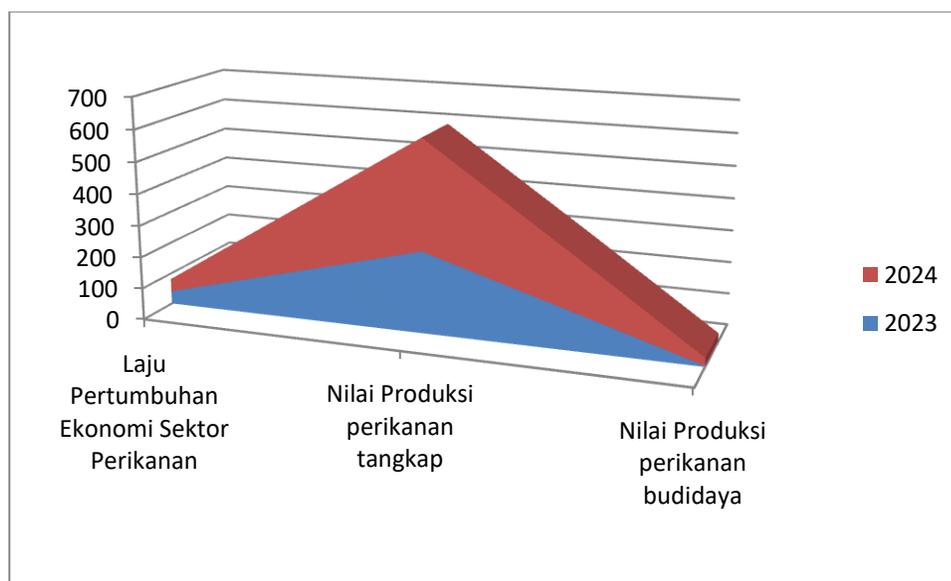
Melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan menetapkan target kinerja 'Nilai LAKIP' dengan target nilai 91,00 Kategori 'AA'. Namun untuk hasil evaluasi pada tahun 2024 masih belum diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sehubungan dengan dalam tahapan penyusunan dan penilaian. Pada tahun 2023, Dinas Perikanan memperoleh nilai 90,4 dengan Predikat AA. Capaian predikat yang dicapai pada tahun 2023 lebih tinggi dari target pada tahun tersebut yakni predikat B. Capaian pada tahun sebelumnya merupakan upaya Dinas Perikanan untuk terus berupaya berbenah dalam pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan nilai capaian pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam upaya merealisasikan target Nilai SAKIP perangkat daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan berupaya menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan untuk memastikan rumusan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil/outcome serta memastikan bahwa indikator kinerja memenuhi kriteria yang terukur, relevan dan cukup sehingga ukuran keberhasilan kinerja menjadi lebih andal.

Upaya peningkatan kualitas LAKIP, diantaranya dilakukan dengan menyusun dokumen rencana aksi yang mencantumkan target secara periodik dan dilakukan monitoring secara berkala (triwulan), termasuk evaluasi dalam rangka pengendaliannya. Penyusunan rencana aksi juga merupakan penjabaran dari target Penetapan Kinerja (PK) Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan menuangkan pengendalian kinerja organisasinya ke dalam dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun secara berkala.

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan



Gambar 7. Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis 2 sebelumnya dan grafik capaian di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud. Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Salah satu Indikator kinerja dalam sasaran Strategis Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh Sektor Perikanan, Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan merupakan Perubahan PDB (atas dasar harga

konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (dalam persen) PDB Perikanan tersebut hanya didasari pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Realisasi Laju pertumbuhan ekonomi sub sector perikanan tahun 2024 belum diperoleh karena masih belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data. Sebagai bahan perbandingan Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 sebesar 2,72, jika dikalkulasi bagi rata, maka laju pertumbuhan sector perikanan mencapai 0,90.

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan antara lain melalui peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, perbaikan iklim investasi terutama investasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi, dan *supply chain* dari hulu sampai hilir. Selain itu dukungan bantuan sarana dan prasarana nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan akan terus ditingkatkan, guna mencapai kenaikan tingkat produksi yang nantinya dapat mempengaruhi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPS Kabupaten Nias Selatan, untuk memaksimalkan penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan untuk memperoleh data valid, maka sangat diperlukan data-data potensi perikanan dan pelaku usaha perikanan setiap tahunnya.

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi sector perikanan dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan antara lain :

- a) Pendekatan Produksi;
- b) Pendekatan pendapatan;
- c) Pendapatan pengeluaran;
- d) Cara Penyajian Produk Domestik Bruto.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan adalah masih belum lengkapnya data untuk memenuhi kebutuhan penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan oleh BPS Kabupaten Nias Selatan. Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang luas dan keterbatasan anggaran sehingga Pendataan Statistik pada Tahun 2023 belum maksimal. Sebagai solusi, maka pada tahun 2024, melalui Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah direncanakan pelaksanaan Pendataan Statistik Perikanan untuk melengkapi data-data dimaksud.

2. Nilai Produksi Perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap adalah salah satu indikator untuk mengembangkan potensi Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah. Nilai produksi perikanan tangkap adalah nilai pada waktu hasil penangkapan didaratkan. Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen.

Realisasi nilai produksi perikanan tangkap tahun 2024 mencapai Rp.346.339.069,- atau terealisasi senilai 130,69 % dari target sebesar Rp.265.000.000.000.- target capaian ini sangat signifikan, nilai capaian dapat mencapai Kategori Memuaskan. Data capaian ini diperoleh dari Validasi Nasional Satu Data KKP yang diinput oleh Validator Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan divalidasi secara berjenjang di tingkat Validasi Provinsi dan Validasi Pusat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk perbandingan realisasi Nilai Produksi perikanan tangkap dengan tahun lalu mengalami kenaikan signifikan. Dimana pada tahun 2023 nilai produksi perikanan mencapai Rp. Rp.246.669.314,-, Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar Rp.275.000.000.000,00, maka capaian tahun 2024 mencapai tingkat kemajuan dengan persentase 125,94 %.

Meningkatnya capaian disebabkan upaya pendataan yang terus dimaksimalkan, sehingga dapat diperoleh informasi produksi di lapangan sebagaimana mestinya.

Capaian nilai produksi perikanan tangkap telah memberikan kontribusi bagi pergerakan ekonomi di tengah masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2024, produktifitas perikanan tangkap mencapai 8.870,65 ton. Capaian ini sangat berdampak pada Perputaran ekonomi masyarakat di lini produksi dan produsen. Bukan hanya bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, capaian produksi perikanan tangkap juga telah membuka peluang usaha, kesempatan kerja dan mata rantai ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan sector lainnya, misalnya sector perdagangan, transportasi, tenaga kerja dan distribusi. Selain itu, produktifitas perikanan tangkap juga sangat berkontribusi dalam upaya Pemerintah dalam penanganan *stunting*, melalui pemenuhan gizi masyarakat dimana ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dikonsumsi.

Fasilitasi sarana dan prasarana nelayan sangat memberikan dampak signifikan dalam peningkatan produksi perikanan tangkap. Selain itu pendataan dan pemetaan potensi pengelolaan perikanan tangkap sangat memberikan pengaruh dalam pencatatan produksi sehingga dapat terukur dan terevaluasi.

Beberapa hal yang menjadi kendala percepatan peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dan produktifitasnya yakni :

- a) Cuaca buruk selama tahun 2024 dengan intensitas yang tinggi dan sering, sangat mempengaruhi jumlah trip operasional nelayan yang berdampak pada hasil produksi;
- b) Sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan masih terbatas dan tradisional. Jumlah Kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
- c) Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);

- d) Fluktuasi harga untuk beberapa komoditas produk perikanan tangkap, sehingga mempengaruhi nilai harga produktifitas nelayan;
- e) Maraknya penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dengan penggunaan bahan peledak (bom ikan) sangat memberikan dampak kerusakan ekosistem kelautan dan perikanan.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala ini telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan melalui pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana nelayan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok nelayan (KUB) dan Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan pihak terkait (TNI-AL). Upaya ini akan terus ditingkatkan guna mencapai realisasi target yang maksimal.

3. Nilai Produksi Perikanan budidaya

Untuk indicator Nilai Produksi Perikanan budidaya perolehan datanya sama dengan Nilai produksi perikanan tangkap, yakni Data capaian ini diperoleh dari Validasi Nasional Satu Data KKP yang diinput oleh Validator Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan divalidasi secara berjenjang di tingkat Validasi Provinsi dan Validasi Pusat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nilai produksi perikanan budidaya adalah nilai pada waktu hasil pembudidayaan didaratkan. Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen. Realisasi nilai produksi perikanan budidaya tahun 2024 mencapai Rp.2.391.400.000,- atau terealisasi senilai 68,29% dari target sebesar Rp.3.500.000.000,- meskipun belum memenuhi target secara total. Untuk perbandingan realisasi nilai produksi tahun ini dengan tahun lalu mengalami kenaikan dengan tingkat capaian 119,66%, Dimana pada tahun 2022 nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp. 2.910.000.000,- dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan.

Sementara realisasi capaian tahun ini jika dibandingkan dengan target akhir renstra telah mencapai tingkat kemajuan 53,11%. nilai ini menunjukkan penurunan signifikan bagi upaya pencapaian target akhir renstra.

Perikanan budidaya adalah salah satu sector penting dalam memenuhi kebutuhan ikan di beberapa wilayah non pesisir Kabupaten Nias Selatan. Prospek sector ini sangat berpeluang pengembangan ekonomi masyarakat kedepannya. Produktifitas perikanan budidaya pada tahun 2024 mencapai 38 ton. Nilai produksi perikanan budidaya telah memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat.

Untuk budidaya laut, beberapa jenis komoditas hasil tangkapan nelayan (Lobster dan Kerapu) ditampung oleh pembudidaya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) untuk dibesarkan dan dijual kembali dengan ukuran tertentu. Selain itu, kegiatan budidaya laut juga membuka peluang bagi nelayan untuk memenuhi kebutuhan 'ikan rucah' sebagai pakan ikan di KJA, hal ini menjadi peluang sumber pendapatan bagi nelayan. Dampak lainnya, perikanan budidaya juga membuka peluang investasi dari luar untuk masuk ke wilayah Nias Selatan mengingat potensi lautnya yang potensial dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Untuk budidaya ikan air tawar (perikanan darat) juga turut memberikan kontribusi ekonomi masyarakat, terutama di kawasan non pesisir dengan memanfaatkan lahan dan sumber air tanah/ aliran air untuk pembudidayaan ikan. Kendala masyarakat yang berlokasi jauh dari pesisir pantai adalah kesulitan dalam mendapatkan ikan sebagai sumber protein hewani, kendala ini dapat terjawab melalui kegiatan budidaya ikan air tawar. Jadi nilai produksi dan produktifitas perikanan budidaya tidak hanya memberikan kontribusi secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemenuhan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kendala percepatan pencapaian peningkatan produktifitas perikanan budidaya antara lain sebagai berikut :

- a) Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dikelola oleh masyarakat masih tradisional dan tidak menerapkan alur produksi sebagaimana mestinya;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya dan minimnya manajemen pengelolaan usaha;
- c) Naiknya harga pakan ikan dan minimnya pengetahuan pembudidaya ikan untuk mendapatkan pakan alternative sebagai solusi kenaikan harga pakan pabrikan;
- d) Minimnya penguasaan teknologi dasar pembudidayaan ikan, sehingga pembudidaya cenderung hanya berkutat pada pembesaran ikan yang tidak termanajemen dengan baik.

Sebagai upaya dan solusi dalam meminimalisir kendala yang ada. Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah melakukan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan bagi kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dalam bentuk pembangunan kolam, penyediaan bibit unggul, penyediaan pakan ikan, dan pembinaan serta pendampingan melalui penyuluhan. Upaya ini akan terus dimaksimalkan kedepannya untuk mencapai realisasi target yang ditetapkan.

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efisiensi = Input Target / Input Aktual \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Relisasi	%	Alokasi	Relisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	Nilai LAKIP	Predikat	91	91	100	733.688.656	714.709.476	97,41
<i>Persentase Rata-rata</i>						100,00			97,41
<i>Tingkat Efisiensi</i>						1,03			

Dengan menyamakan antara Nilai target dan realisasi, Dari **Tabel 3.8** diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi Sasaran Strategis 1 mencapai 1,03. Nilai ini secara kategori bahwa capaian kinerja yang dihasilkan dengan sumberdaya yang digunakan *efisien*. Nilai tingkat efisiensi diatas merupakan kalkulasi sementara, belum memperhitungkan capaian Nilai LAKIP yang nilai evaluasi sebenarnya masih belum diperoleh.

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 2
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Relisasi	%	Alokasi	Relisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	2,97-4,15	-	-			
		Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/ Milyar	265	256,66	346,34	345.125.118	339.755.402	98,44
		Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/ Milyar	3,5	2,910	2,390	149.112.958	148.458.214	99,56
<i>Persentase Rata-rata</i>						174,37			99,00
<i>Tingkat Efisiensi</i>						1,76			

Sementara untuk Sasaran Staretgis 2 mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,76 sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 3.9** Nilai ini menunjukkan bahwa output kinerja dengan sumberdaya yang digunakan *Efisien*. Belum terpenuhinya tingkat efisiensi ini disebabkan oleh beberapa factor sebagaimana kami uraikan sebelumnya. Namun, nilai ini belum memperhitungkan persentase laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan yang datanya masih belum diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan/Indikator Kinerja

Program/kegiatan penunjang tercapainya sasaran strategis Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan Tahun 2024 terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perikanan Tangkap;
- c. Program Perikanan Budidaya;
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan ini, hal yang menjadi kendala adalah Nomenklatur susunan struktur organisasi Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan saat ini, berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 terdapat salah satu program/kegiatan yang relevan lagi dengan urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi nomenklatur kabupaten/kota Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu pada *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*, dimana tidak ada struktur Bidang teknis yang secara Tupoksi menangani Program/Kegiatan ini sehingga sebagai solusi alternatif, pelaksanaan program ini dibebankan pada Bidang lain sebagai tugas tambahan.

Adapun realisasi Program/kegiatan penunjang tercapainya sasaran strategis pada Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.10 Program/Kegiatan Penunjang Capaian Sasaran Strategis

No.	Indikator Program	Capaian Kinerja Program			Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
		Target	Realisasi	%				
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan; Nilai Lakip OPD	100%	100%	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan RKA SKPD	1 Dokumen
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan keuangan	12 Dokumen
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket Kegiatan Administrasi umum	5 paket
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	12 Laporan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD yang dipelihara	1 Unit
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan								
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	8750 Ton	8870,45 ton	101,38	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Perahu/Kapal Penangkap Ikan Uk. 1 GT	1 Unit
							Perahu Penangkapan Ikan Ik. 0,5 GT	4 Unit
							Kapal Penangkap Ikan Ukuran 5 GT beserta Mesin	1 Unit
							Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan : Fish Finder + GPS Komplit	1 Unit
							Pengadaan Cold Box untuk nelayan	2 Buah
							Mesin BBG untuk nelayan	50 Unit

No.		Indikator Program	Capaian Kinerja Program			Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
			Target	Realisasi	%			
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya	45 Ton	38 ton	84,44	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penyuluhan Pembudidayaan Ikan	15 Kelompok
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembangunan Kolam Budidaya Ikan Air Tawar	1 Unit/Paket
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produk hasil olahan kelautan dan perikanan	2500 ton	2330 ton	93,2	Pendataan Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Dokumen Produksi	1 Dokumen

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 sebesar Rp. 1.255.080,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.247.257.092,00 sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar 97%. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas PerikananTA. 2024

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran sesuai DPA-P (Rp.)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	2	3	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	716.142.924	714.709.476	99,80%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	345.125.118	339.755.402	98,44%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	149.112.958	148.458.214	99,56%
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	44.699.000	44.334.000	99,18%
Jumlah		1.255.080.000	1.247.257.092	99,38%

Capaian realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,38% dikarenakan terdapat sisa realisasi pembayaran pada pengadaan barang dan jasa yang merupakan selisih harga, dan kemudian dihitung sebagai silfa (Sisa anggaran).

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Keberadaan sumberdaya perikanan Kabupaten Nias Selatan yang besar merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk mengatasinya. Permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi usaha perikanan, belum diterapkannya teknologi perikanan secara optimal, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang masih rendah.

Pada tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.255.080.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.247.257.092,00 sehingga persentasenya adalah sebesar 99,38%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai capaian kinerja yang menjadi indikator perangkat daerah Dinas Perikanan kabupaten Nias Selatan. Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan mencapai persentase rata-rata kinerja sebesar 95,16%, sementara Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mencapai persentase sebesar 90%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja OPD kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu langkah – langkah sebagai berikut :

- a) Sosialisasi, pembinaan/ pendampingan, pelatihan, dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangan bagi nelayan;
- b) Sosialisasi, pembinaan/ pendampingan, dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- c) Fasilitasi rantai dan akses pemasaran;

- d) Perlunya ditingkatkan diversifikasi produk olahan yang berkualitas dan sesuai permintaan pasar;
- e) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan baik secara Kuantitas maupun kualitas;
- f) Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Pelaku Usaha Perikanan) dalam memperbaiki Prasarana Usaha ditengah anggaran terbatas.

Teluk Dalam, 27 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,



TEHEJATULO SARUMAHA, S.Pt
PEMBINA Tk. I
NIP 19801212 201101 1 002

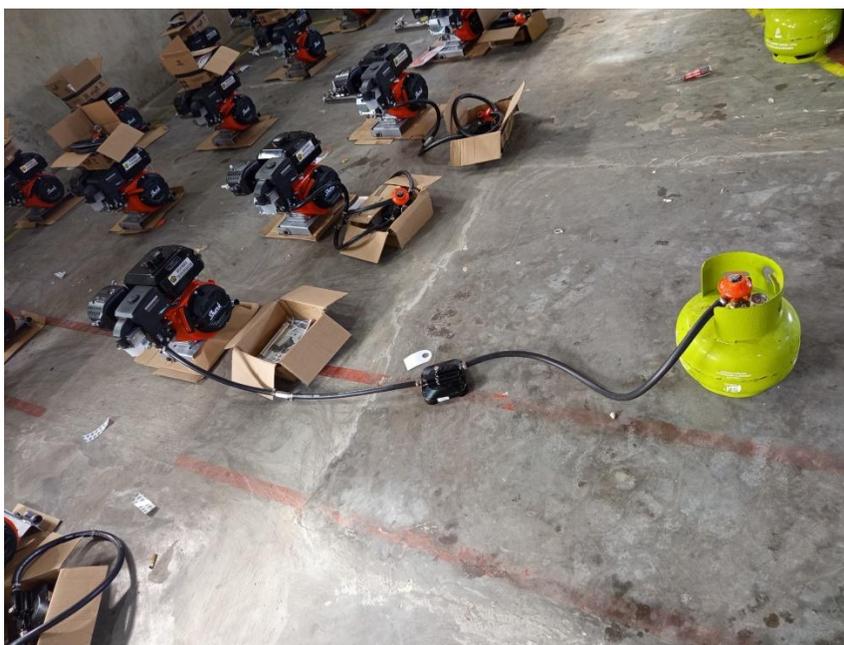
LAMPIRAN

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NIAS SELATAN TA. 2024**

Kegiatan Perikanan Budidaya



Kegiatan Perikanan Budidaya



Kegiatan Perikanan Budidaya





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERIKANAN

Jl. Pasir Putih Komplek TPI Teluk Dalam, Nias Selatan (22865)
Email : dkp.kabnisel@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **TEHEJATULO SARUMAHA, S.Pt**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
2. Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 03 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
BUPATI NIAS SELATAN

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TEHEJATULO SARUMAHA, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP 19801212 201101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP Evaluasi Internal	A	Predikat
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	4,15-5,33	%
		Nilai Produksi perikanan tangkap	275	Milyar/ Rupiah
		Nilai Produksi perikanan budidaya	4,00	Milyar/ Rupiah

**ANGGARAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	902.256.894	
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.171.185.533	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	269.052.468	
4	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	37.505.106	
	Jumlah	2.380.000.000	

Teluk Dalam, 03 Januari 2025

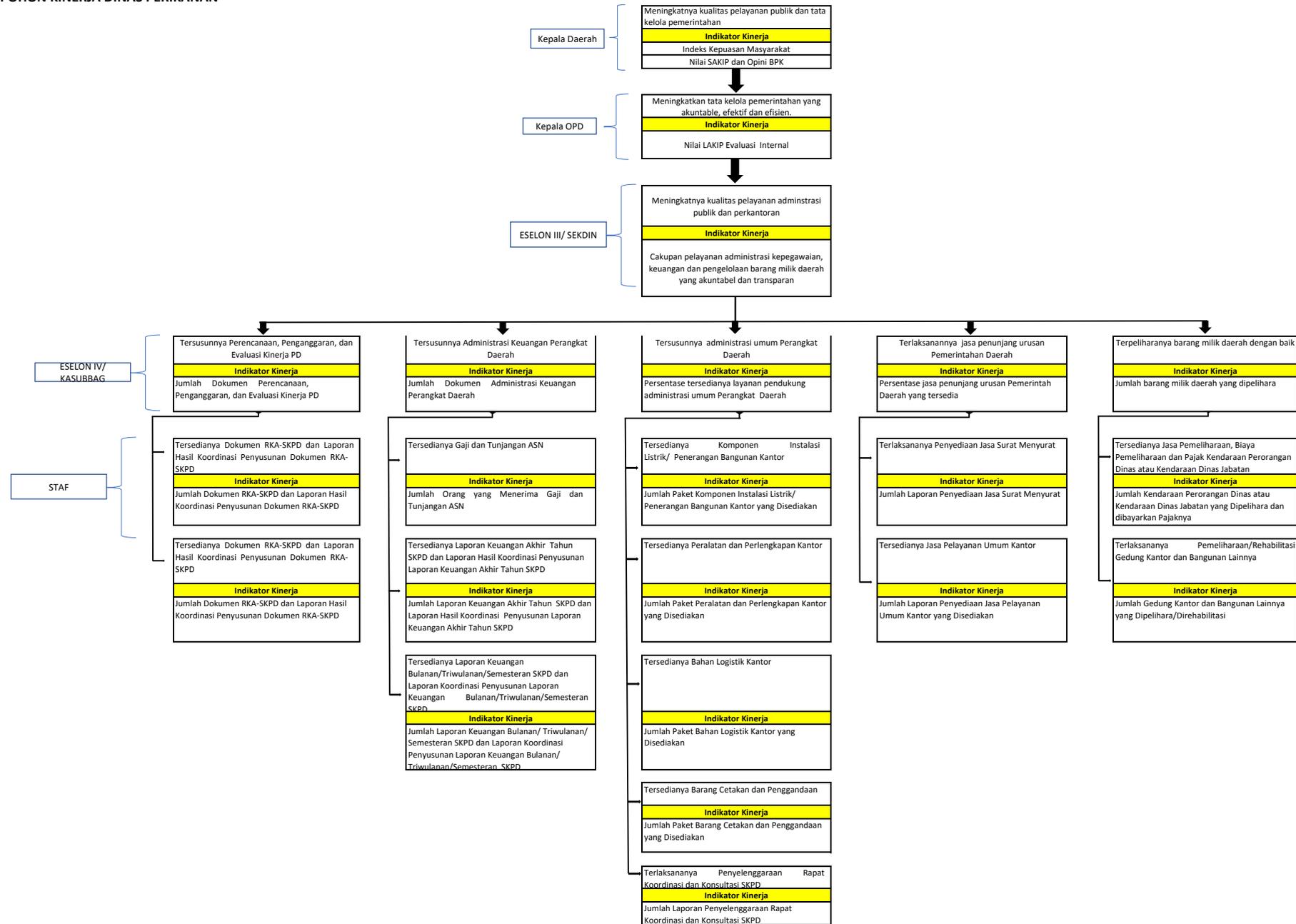
Pihak Kedua,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

Pihak Pertama

TEHEJATULO SARUMAHA, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP 19700416 198909 1 002

POHON KINERJA DINAS PERIKANAN



POHON KINERJA DINAS PERIKANAN

